

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hasil penelitian kebijakan kendaraan listrik di Indonesia telah memiliki landasan regulasi dan dukungan politik yang kuat serta didukung oleh berbagai program pemerintah. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi beberapa tantangan, khususnya dalam hal pengembangan infrastruktur yang masih terbatas, peningkatan kapasitas administratif, dan penerimaan masyarakat yang masih belum masif beralih pada kendaraan listrik. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan efektivitas kebijakan kendaraan listrik, termasuk penguatan insentif ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta kampanye edukasi yang lebih luas guna meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kendaraan listrik di Indonesia. Jika dibandingkan dengan China, Indonesia masih berada pada tahap awal pengembangan. China telah berhasil menerapkan kebijakan kendaraan listrik secara terintegrasi, dengan investasi besar, regulasi konsisten, dan infrastruktur yang masif. Pengalaman China menunjukkan bahwa keberhasilan transisi ini memerlukan koordinasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, investasi besar pada infrastruktur, serta strategi komunikasi yang efektif untuk membangun kesadaran publik. Oleh karena itu, Indonesia dapat belajar dari pendekatan holistik China yang menggabungkan sinergi lintas sektor dan implementasi kebijakan berbasis *top-down* maupun *bottom-up*.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga pada kesiapan sosial dan budaya masyarakat dalam menerima perubahan menuju energi bersih. Kesadaran akan tantangan yang dihadapi menjadi langkah awal untuk memperbaiki kebijakan yang telah ada. Dengan komitmen yang lebih kuat, sinergi lintas sektor yang lebih erat, serta pendekatan adaptif yang mempertimbangkan kondisi lokal, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan ekosistem kendaraan listrik yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, transisi ini harus dipandang sebagai bagian dari transformasi besar menuju keberlanjutan, yang tidak hanya berorientasi pada target jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi kuat bagi generasi mendatang.

Peneliti juga menjabarkan kesimpulan pada point-point utama yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu;

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*):

- 1) Implementasi kebijakan kendaraan listrik didasarkan pada Peraturan Presiden No.55 Tahun 2019 dengan perubahan pada Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2023 dan beberapa peraturan teknis lainnya melalui KementrianESDM, Kementerian Perhubungan serta PT PLN (Persero).
- 2) Tujuan kebijakan meliputi efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, transisi transportasi ramah lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.
- 3) Manfaat jangka panjang mencakup pengurangan polusi udara, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan

lapangan pekerjaan baru pada sektor energi terbarukan.

- 4) Infrastruktur pendukung masih dalam tahap pengembangan, dengan jumlah stasiun pengisian yang terbatas.

2. Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*):

- 1) Aktor utama meliputi pemerintah pusat, daerah, PT PLN, sektor swasta (produsen kendaraan listrik), dan masyarakat sebagai pengguna.
- 2) Indonesia memiliki landasan regulasi yang cukup membangun ekosistem kendaraan listrik, tetapi implementasi pada tingkat daerah membutuhkan penguatan.
- 3) Tantangan distribusi energi listrik yang belum merata dan harga kendaraan listrik yang masih mahal bagi mayoritas masyarakat Indonesia.

3. Perbandingan dengan China

- 1) China memiliki kebijakan yang lebih terintegrasi, dengan kombinasi strategi *top down* dan *bottom up*.
- 2) China memiliki ketetapan target yang ambisius dan investasi besar untuk mendukung industri kendaraan listrik.
- 3) Indonesia dapat mengadaptasi keberhasilan China dalam membangun infrastruktur, memperkuat regulasi, dan meningkatkan kesadaran publik.
- 4) China mendorong strategi pengembangan melalui riset oleh para akademisi sebagai acuan dari implementasi kendaraan

listrik.

4. Pembelajaran

- 1) Kebijakan yang lebih spesifik, terukur, konsisten, dan komprehensif untuk mengatasi tantangan lokal.
- 2) Pentingnya koordinasi lintas sektor dan integrasi pemerintahan.
- 3) Perluasan infrastruktur dan subsidi yang lebih inklusif untuk mendorong adaptasi kendaraan listrik.
- 4) Penguatan industri lokal untuk meminimalisir biaya impor kendaraan listrik.

4.2 Rekomendasi Kebijakan

Implementasi kebijakan kendaraan listrik di Indonesia merupakan langkah strategis dalam transisi menuju energi berkelanjutan dan penurunan emisi karbon serta pertumbuhan ekonomi hijau. Namun, implementasi tersebut memiliki tantangan besar seperti keterbatasan infrastruktur, daya beli masyarakat yang rendah, dan koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan belajar dari keberhasilan negara China yang telah berhasil mengintegrasikan kebijakan secara komprehensif, Indonesia memiliki peluang untuk mempercepat transformasi melalui langkah strategis, melibatkan semua pemangku kepentingan. Pada penelitian ini peneliti menganalisis pada sudut pandang keilmuan Administrasi Publik sehingga timbulah rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil konten analisis pada penelitian ini yang dapat dijadikan referensi oleh pemangku kepentingan dan para peneliti selanjutnya untuk keberlangsungan proses panjang dari implementasi kebijakan kendaraan listrik di Indonesia. Rekomendasi kebijakan

ini disusun berdasarkan kategori prioritas kebijakan, kapasitas pemerintah, kondisi ekonomi, politik dan sosial di Indonesia dan kebijakan yang belum pernah dilakukan di Indonesia yaitu:

1. Konsistensi regulasi dan penguatan koordinasi kebijakan

Sebagai negara yang baru menerapkan kebijakan kendaraan listrik, Indonesia perlu memberikan konsistensi penuh terhadap kebijakan terkait kendaraan listrik dan elemen terkait lainnya walaupun pada teks penelitian kemunculan kategori regulasi pemerintah sebesar 12 kali dan dukungan politik sebesar 16 kali. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat komitmen kuat dari pemerintah dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik melalui kebijakan. Namun, Indonesia belum memiliki kebijakan yang konsisten masih terdapat perubahan-perubahan pada setiap kebijakan dan kebijakan turunan pada tiap wilayah Indonesia juga belum sepenuhnya tersedia menghambat pengembangan infrastruktur dan investasi yang bisa dilakukan pada setiap wilayah di Indonesia sehingga rekomendasi ini menjadi prioritas yang bisa dilakukan pemerintah untuk adopsi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

2. Peningkatan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik

Indonesia perlu mempercepat pembangunan infrastruktur pengisian daya dan meningkatkan kapasitas energi baru terbarukan untuk mendukung kebutuhan daya kendaraan listrik melalui dukungan investasi publik dan swasta. Hal ini menjadi prioritas karena beriringan

dengan percepatan pemerintah yang terus dilakukan sehingga pengguna kendaraan listrik memiliki potensi untuk terus bertambah dan menjadi branding pemerintah bahwa kebijakan yang didasari program memiliki kesiapan untuk diimplementasikan oleh masyarakat.

3. Perluasan kolaborasi internasional

Kapasitas yang mampu dilakukan pemerintah Indonesia adalah melakukan kerja sama internasional tidak hanya didominasi oleh pasar kendaraan listrik dari China saja tetapi dari negara lain seperti Norwegia, Islandia, Swedia yang memiliki persentase kendaraan listrik terbesar selain China. Hal ini bisa dilakukan juga pada aktivitas riset keilmuan atau pembuatan infrastruktur yang bisa diadaptasi pada negara-negara tersebut melalui kerjasama bilateral sehingga tidak terpaku pada industri China dan konsumen memiliki pilihan variasi produk.

4. Penyediaan industri lokal

Pengembangan industri lokal sangat diperlukan termasuk produksi baterai berbasis nikel, komponen kendaraan listrik dan teknologi kendaraan listrik untuk mengatasi masalah tingginya harga jual dapat dilakukan dengan meningkatkan peran UMKM lokal dalam ekosistem kendaraan listrik seperti bengkel konversi, suku cadang dan layanan pendukung lainnya. Kolaborasi lokal juga diperlukan untuk memberikan identitas karakteristik budaya lokal Indonesia dalam mengikuti transisi teknologi modern.

5. Regulasi pembatasan impor kendaraan listrik

Pemerintah Indonesia saat ini belum memberlakukan regulasi yang secara khusus membatasi impor kendaraan listrik karena Indonesia masih terus berusaha untuk melakukan percepatan salah satunya melalui insentif impor yang dipermudah dan tidak diberikan biaya berpotensi untuk melemahkan perekonomian dalam negeri karena negara asing dengan leluasa melakukan aktivitas ekonomi tanpa berinvestasi ataupun membuat industri dalam negeri yang memberdayakan sumber daya manusia di Indonesia.

6. Program konversi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik

Banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan kendaraan konvensional tentunya berpengaruh pada minat masyarakat pada kendaraan listrik sehingga pemerintah bisa melakukan program untuk konversi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik dengan bantuan insentif atau secara gratis untuk melihat partisipasi masyarakat pada ekosistem kendaraan listrik.

7. Elektrifikasi wajib kendaraan dinas secara menyeluruh

Banyaknya dinas yang ada di Indonesia bisa menjadi percontohan bagi masyarakat sebagai birokrat yang mendukung program kendaraan listrik dengan menyediakan atau menggunakan kendaraan listrik pada lembaga atau instansi serta menyediakan sarana pengisian untuk mempermudah penggunaan kendaraan listrik. Secara keseluruhan kendaraan dinas di Indonesia masih menggunakan bahan bakar fosil

karena peralihan memerlukan waktu, anggaran dan infrastuktur yang memadai.

Menghadapi tantangan global terkait lingkungan dan transisi energi, implementasi kebijakan kendaraan listrik menjadi langkah strategis dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan ketahanan energi nasional. Meskipun terdapat kemajuan, seperti penguatan regulasi, insentif ekonomi, dan pembangunan infrastruktur awal, koordinasi terintegrasi dan intensif antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci, memastikan implementasi berjalan efektif dan inklusif. Rekomendasi yang diusulkan menyoroti pentingnya penguatan kebijakan, percepatan infrastruktur, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta keterlibatan aktif masyarakat dan swasta. Dengan adanya sinergi yang efektif, Indonesia memiliki potensi yang signifikan untuk menjadi pemimpin dalam transisi menuju kendaraan listrik, yang akan memberikan manfaat jangka panjang. Hal ini tidak hanya akan mendukung pengurangan emisi karbon, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan akademisi dapat terlihat pada penelitian yang dilakukan peneliti sebagai bagian dari akademisi berkontribusi dalam mengkaji bagaimana proses implementasi kebijakan kendaraan listrik di Indonesia, menjadikan harapan bagi peneliti untuk bisa mendorong peneliti-peneliti lainnya untuk menjawab implikasi dan hambatan lain pada topik kebijakan kendaraan listrik di Indonesia.